

**STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA ALAM DI
KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AYU KARLINA

NIM. 150802075

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S-I)
Dalam Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan Oleh:

**AYU KARLINA
NIM. 150802075**

**Mahasiswa Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

**Dr. Mukhlisah, MA
NIP. 197609012007102001**

Pembimbing II,

**Mirza Fagikri, M.si
NIDN. 2002079001**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

AYU KARLINA
NIM: 150802075

Pada Hari/Tanggal
Senin,

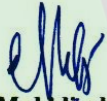
29 Juli 2019 M
26 Dzul-Qa'dah 1440 H

Di

Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Mukhlisah, MA
NIP. 197609012007102001

Sekretaris,


Mirza Fauzikri, M.Si
NIDN. 2002079001

Penguji I,

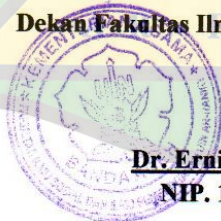

Dr. S. Amirul Kamar, MM., M.Si
NIP. 19610051982031007

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan




Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum
NIP. 19730723000032002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Karlina
Nim : 150802075
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Banda Aceh, 26 Juli 2019

g Menyatakan



Ayu Karlina
nim. 150802075

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang potensial terdiri dari 57 objek wisata yang dominan berasal dari objek wisata bahari. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi pengangguran dan lain sebagainya. Meskipun potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Jaya sudah memadai, namun dalam proses pengembangannya, saat ini masih belum sepenuhnya dapat dikembangkan dengan baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya serta bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga strategi pemerintah dalam pengembangan potensi wisata alam yaitu melakukan pengembangan pemasaran wisata, pengembangan destinasi wisata serta pengembangan kemitraan. Dari tiga strategi tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dikarenakan masih sulitnya masyarakat luas memperoleh informasi tentang wisata terutama dari website resminya, kurangnya sarana dan prasarana serta tidak adanya pelatihan untuk tenaga ahli bidang kepariwisataan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengembangan wisata, maka digunakan teori yang dikemukakan oleh Yoeti bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengembangan wisata yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata, adanya aksesibilitas dan adanya fasilitas. Dari ketiga faktor tersebut, Kabupaten Aceh Jaya hanya memenuhi satu faktor keberhasilan pengembangan wisata yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata. Adapun yang menjadi peluang dari potensi wisata yang dimiliki adalah peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemudian secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh daerah sekaligus dapat berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan. Sedangkan yang menjadi tantangan dalam proses pengembangan potensi wisatanya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap potensi wisata, perencanaan yang belum terintegrasi dengan baik, terbatasnya aksesibilitas fasilitas dan infrastruktur pendukung, belum optimalnya sumber daya manusia yang ada, lokasi wisata yang belum bersih, kurangnya anggaran serta belum rampung nya nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja pariwisata (SOTK), Qanun Wisata Halal dan belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

Kata kunci: Strategi Pengembangan, Potensi Wisata Alam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi **“Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Aceh Jaya”**. Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati kepada pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabat Beliau.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah S.W.T yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasihat serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Ayahanda Samsudin (Alm) yang sudah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, dan Ibunda Kamsiah yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia dan akhirat serta memberikan semangat, dorongan, bimbingan dan juga akomodasi biaya yang tak terhingga kepada penulis. Penulis juga sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Abang Rizal Fauzi, Kakak Rifka Handayani serta seluruh keluarga besar penulis, karena dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut juga menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Reza Idria, S.HI., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
3. Ibu Dra. Maimunah, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Saifullah Isri, M. Pd selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak Dr. Mukhlisah selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan disela-sela kesibukan beliau.
6. Bapak Mirza Fanzikri, M.Si selaku pembimbing kedua dan yang paling utama, telah meluangkan waktu dan tak pernah bosan-bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Prodi dan Dosen Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh informan yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam proses wawancara.
9. Kepada Fatna, Hajar, Nabilla, Nadhira, Amelia, Dara, Nisak, Sani, Ayi, Anji, Habib, Barlisi, Said, Zulikram, Ilham serta sahabat-sahabat dari masa SMA yang telah membantu.

10. Teman-teman seangkatan, Fitri Rahmawati, Adila Muarifa, Sri Wahyuni, Nurul Fadzhilah, Nurul Bariyah, Sofia Wirda dan Putri Maulina, Mirza Maulana, Alvian, Kemal, Saiful, Anas, Dedi serta seluruh Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 lainnya yang ikut memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan di masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 26 Juli 2019
Penulis,

Ayu Karlina



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Penelitian Terdahulu	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 12
2.1 Teori Strategi.....	12
2.2 Teori Pengembangan.....	14
2.3 Teori Pelayanan.....	20
2.4 Teori Organisasi	24
2.5 Konsep Objek Wisata Alam.....	27
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data	31
3.5 Informan Penelitian	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data	34
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 35
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya	35
4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Jaya	36
4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Jaya.....	37
4.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Jaya	40
4.2 Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam	41

4.2.1 Peluang dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam	55
4.2.2 Tantangan dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 : Peta Administrasi Kabupaten Aceh Jaya



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Destinasi dan Kunjungan wisatawan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2016

Tabel 4 : Keadaan Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry

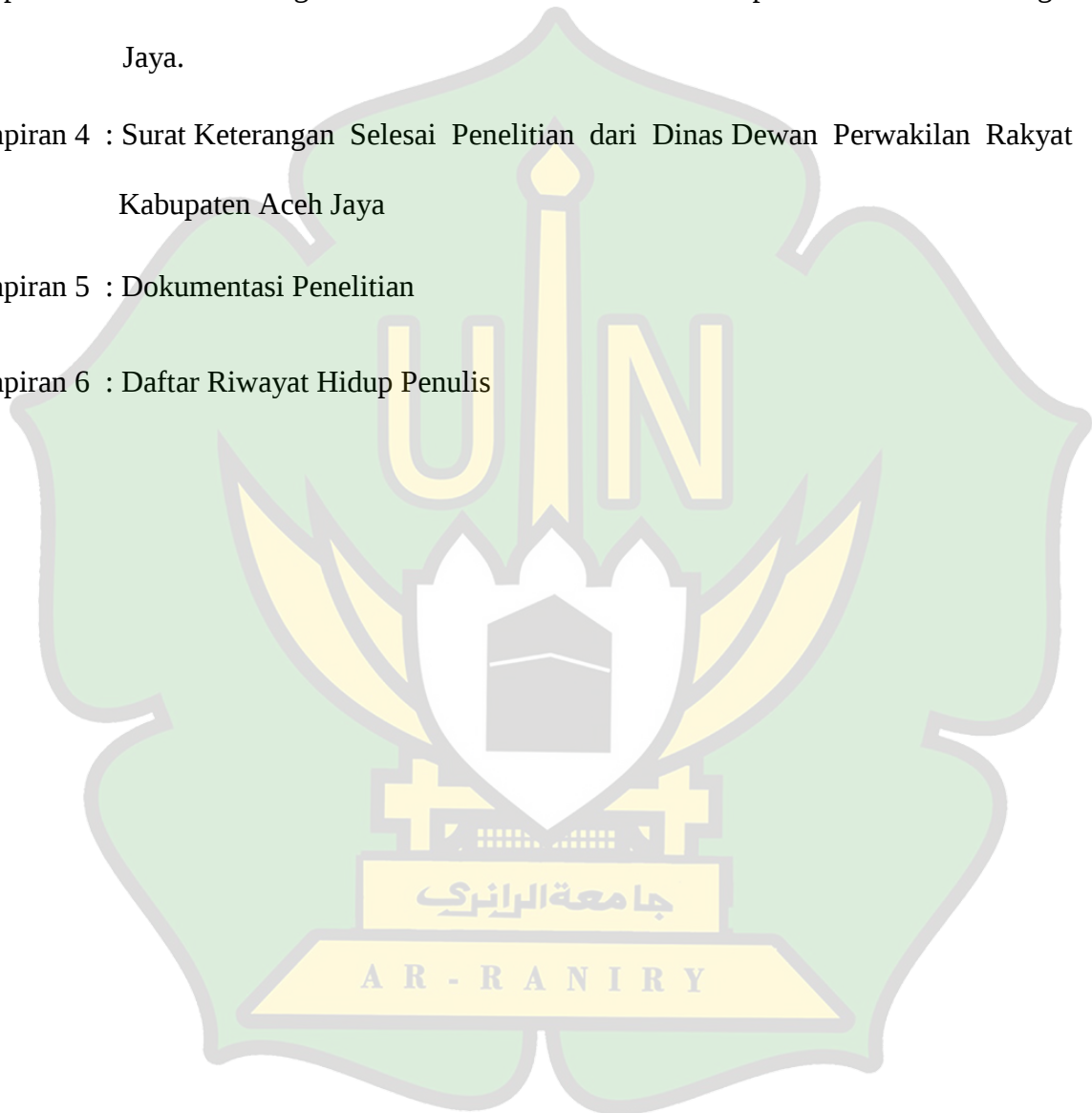
Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Kepemudaan dan Olah raga Aceh
Jaya.

Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Jaya

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi dengan keanekaragaman suku, agama, adat istiadat, ras, dan budaya. Keberagaman yang dimiliki tersebut menjadi keuntungan dalam maju dan berkembangnya pemerintahan Indonesia. Sumber daya alam adalah aset utama yang harus dikelola dengan sedemikian rupa karena kekayaan dan keindahan yang dimiliki Indonesia, kini dapat menjadi salah satu sektor yang dapat menyumbang pendapatan bagi negara.

Selain mampu melestarikan alam, memajukan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kepariwisataan juga bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990. Secara regulatif, Undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar dapat membantu terciptanya *Sustainable Tourism Industry*. Undang-undang sebelumnya belum mampu mengatasi permasalahan ataupun menjawab tantangan mengenai pariwisata Indonesia.

Sektor pariwisata dapat dikatakan bersentuhan langsung dengan masyarakat dari tingkat ekonomi yang paling bawah, karena masyarakatlah yang akan melakukan kontak langsung dengan para wisatawan. Untuk itulah Undang-undang

Nomor 10 Tahun 2009 ini ditetapkan, sehingga para pengrajin, pemandu wisata, dan para pelaku wisata kecil dan menengah dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹

Karena banyaknya objek wisata yang ada, maka diperlukannya suatu lembaga yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepariwisataan itu sendiri atau yang disebut dengan Kementerian Pariwisata. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, bahwa Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang dipimpin oleh seorang Menteri. Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.²

Pada tingkat Provinsi, kepariwisataan diurus langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Disbudpar memiliki tugas pokok antara lain untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi daerah di bidang kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembinaan yang telah diberikan oleh Gubernur atau Kepala Daerah. Adapun fungsi dari Disbudpar adalah untuk memberikan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan

¹ Aditya Yuli, *City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek*. Jurnal Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari 2011.

²Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata

yang berlaku serta pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, lembaga yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan kepariwisataan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Namun pada daerah-daerah yang tidak memiliki Disbudpar secara khusus, maka lembaga yang mengurus kepariwisataan adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) seperti yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya. Dispora adalah sebuah lembaga yang merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan dan pelayanan kepariwisataan, yang meliputi kepemudaan, keolahragaan, penyusunan sistem informasi dan kerja sama keolahragaan serta melaksanakan ketatausahaan dinas.⁴

Perlunya perhatian khusus terhadap hal ini juga dikarenakan sektor pariwisata merupakan sektor yang menjadi salah satu penggerak ekonomi yang kontribusi nya mencapai 4% dari total perekonomian Indonesia, maka tentu fungsi pemerintah dalam mengelolanya harus ditingkatkan lagi. Apalagi saat ini pemerintah ingin meningkatkan angka ini dua kali lipat menjadi 8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk keberhasilan target tersebut, maka pemerintah kedepan akan melakukan perbaikan pada bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, akses, kesehatan, dan kebersihan serta meningkatkan kampanye promosi online

³ Anita Sari, *Laporan Praktik Kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Universitas Widyatama, 2006, hlm. 5-6

⁴ Pemerintah Kabupaten Bandung. *Tupoksi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata*. 2013. (<http://www.bandungkab.go.id/arsip/tupoksi-dinas-pemuda-olah-raga-dan-pariwisata>). (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019).

(marketing) di luar negeri.⁵ Jika kita melihat dari kondisi tersebut, manfaat yang dirasakan karena keberadaan wisata ini sangatlah besar bagi Indonesia.

Tantangan demi tantangan dalam proses pencapaian target tersebut tentu menjadi hal utama yang harus dibenahi, oleh karenanya pemerintah harus lebih gencar dan inovatif dalam memaksimalkan potensi wisata dan menciptakan berbagai strategi dalam mempromosikan setiap objek wisata tersebut sehingga dapat memberikan dampak yang baik bagi pengembangan wisata ke depan.

Secara umum, wisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi wisata sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata. Termasuk kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. Swasta dalam hal ini merupakan asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah berbagai wilayah administrasi, mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan seterusnya. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut saling kerja sama, seperti kewajiban pemerintah adalah bersama-sama merencanakan, membangun, mengorganisasikan, memelihara, dan mengawasi dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata.⁶

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata untuk dikembangkan adalah Aceh, khususnya daerah Aceh Jaya. Aceh Jaya adalah sebuah

⁵<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2019).

⁶ Deddy Prasetya Maha Rani, *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur*, Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 412-421.

daerah yang diresmikan pada tanggal 10 April 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan wilayah pesisir Barat pantai Sumatera dengan panjang garis pantai lebih kurang 160 kilometer. Aceh Jaya memiliki luas wilayah 3.814 km² dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 21,17 jiwa/km² dan populasi penduduk mencapai 87,622 jiwa. Wilayah administrasinya terdiri dari 9 Kecamatan, 21 Mukim dan 172 Desa. Rata-rata mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mata pencaharian dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.⁷

Melihat keadaan geografis tersebut maka tentu Aceh Jaya dari segi sumber daya alam mempunyai tempat-tempat yang sangat berpotensi menjadi objek wisata yang sangat menarik. Maka tidak heran saat ini Aceh Jaya memiliki 57 objek wisata.⁸ Keberadaan wisata yang dimiliki oleh Aceh Jaya salah satu yang dominan berasal dari objek wisata alam seperti Pulo Keluang.

Pulo Keluang merupakan sebuah objek wisata alam yang terletak di Gampong Ujoeng Sudheun, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten sekitar 70 Km. Objek wisata ini sering didatangi oleh wisatawan karena dikenal dengan pasirnya yang putih, tebing batu yang kokoh, perairan yang jernih dan gua yang menantang untuk dijelajahi. Dengan keunikan yang dimiliki, tentu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Aceh Jaya.

⁷Badan Pusat Statistik(BPS). *Aceh Jaya dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Aceh Jaya. (<https://acehjayakab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2017&Publikasi%5BkataKunci%5D=aceh+jaya+dalam+angka&yt0=Tampilkan>). (Diakses pada tanggal 7 April 2019).

⁸ Dokumen Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022

Adapun wisatawan yang berkunjung ke Pulo Keluang ini berasal dari berbagai daerah baik wisatawan lokal yang berasal dari Aceh maupun wisatawan mancanegara. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung pada objek wisata ini karena tergiur akan keindahan alam yang dimiliki sehingga sering sekali wisatawan yang berkunjung tersebut menikmati keindahannya dengan menghabiskan malam di Pulo Keluang tersebut misalnya dengan berkemah, berenang, memancing dan lain sebagainya. Banyaknya kunjungan wisatawan yang datang dapat dibuktikan dengan adanya jumlah destinasi dan kunjungan wisatawan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2016.⁹

Tabel 1 Jumlah Destinasi dan Kunjungan wisatawan di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Destinasi (objek)	38	38	46	57	57
2.	Jumlah Kunjungan (orang)	93.182	97.269	115.738	141.057	161.741

Sumber : Dispora Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2016

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah objek wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya pada tahun terakhir sebanyak 57 objek wisata dengan jumlah kunjungan sebanyak 161.741. Hal ini tentunya menjadi aset yang sangat berharga bagi pemerintah Aceh Jaya dalam mempromosikan daerahnya guna mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

⁹ Dispora Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012-2016

Meskipun potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Jaya sudah memadai, berdasarkan observasi awal peneliti, potensi wisata tersebut saat ini masih belum sepenuhnya dapat dikembangkan dengan baik. Seharusnya, dengan adanya objek wisata yang dimiliki menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata maka tujuan dari kepariwisataan itu sendiri adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat mengatasi pengangguran dan lain sebagainya.¹⁰ Hal tersebut jauh berbeda dari komitmen yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam visi misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati saat kampanye sebelum terpilih untuk menjadikan Aceh Jaya sebagai salah satu daerah destinasi wisata. Hingga masa jabatannya saat ini, hal tersebut masih belum menunjukkan hasil atau kejelasan bahwa Kabupaten Aceh Jaya bisa menjadi daerah wisata unggulan di Aceh. Ketidakefektifan sektor pariwisata di jajaran Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya menjadi salah satu penyebab lambatnya pengembangan wisata itu sendiri sehingga potensi yang dimiliki belum bisa memberikan manfaat yang signifikan. Seharusnya, potensi wisata menjadi salah satu prioritas yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah setempat agar dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik.¹¹ Oleh sebab itu, maka pemerintah harus mempunyai strategi-strategi dalam mengembangkan potensi wisata di Aceh Jaya.

Dari adanya persoalan dalam pengembangan potensi wisata tersebut, maka diperlukannya penyelesaian-penyelesaian yang tepat agar mendapat solusi yang optimal. Keterlibatan pemerintah, masyarakat dan pihak swasta akan memudahkan proses pengembangan wisata yang semakin maksimal. Inilah yang menjadi latar

¹⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

¹¹<https://acehtribunnews.com/2019/02/02/pengembangan-pariwisata-aceh-jaya-disorot>. (Diakses pada tanggal 10 April 2019).

belakang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Kabupaten Aceh Jaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimana peluang dan tantangan dalam pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun secara langsung yang terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya. Kemudian juga sebagai bahan pemahaman bagi peneliti

dan mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan lebih mendalam mengenai strategi pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam upaya pengembangan potensi wisata. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagaimana strategi pengembangan potensi wisata alam serta bagaimana peluang dan tantangan dalam pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberi dampak kesejahteraan, kemanfaatan, dan lapangan pekerjaan berdasarkan aktivitas-aktivitas wisatawan pada objek wisata alam di Aceh Jaya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Penelitian pertama Agus Ananto Widodo, Hesti Lestari. Judul jurnal Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata Kabupaten Semarang memiliki beberapa faktor pendukung misalnya objek wisata yang beragam dan terus bertambah, lingkungan ekonomi, politik dan sosial budaya yang kondusif, kemampuan SDM yang mumpuni. Di sisi lain pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang juga mempunyai faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah sektor industri yang belum mendukung

pariwisata, penyediaan informasi yang belum maksimal, penggunaan teknologi yang belum maksimal, kurangnya anggaran, kurangnya jumlah SDM, dan lain-lain.¹²

Penelitian kedua Kartini La Ode Unga, I Made Benyamin dan Ronald Alexander Barkey. Judul jurnal Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor internal yang mendukung pengembangan pariwisata Kepulauan Banda adalah keragaman atraksi, image kawasan yang sudah terkenal sejak VOC, sifat keterbukaan, keamanan, dan kemudahan mencapai lokasi. Sementara faktor yang menghambat adalah belum adanya pusat informasi wisata, sifat terhadap lingkungan yang sangat rendah, Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata masih rendah serta belum memadai nya akses infrastruktur. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung pengembangan pariwisata Kepulauan Banda adalah aksesibilitas, perkembangan teknologi dan informasi, regulasi serta tingginya potensi dan minat wisatawan.¹³

Penelitian ketiga SefiraRyalita Primadany, Mardiyono, Riyanto. Judul jurnal Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa masih kurangnya upaya dari pemerintah daerah yang belum maksimal dalam mempromosikan wisata mengakibatkan potensi-potensi objek wisata yang dimiliki tidak dapat berkembang secara optimal. Di sinilah pentingnya peraturan dan kesadaran dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan di sektor pariwisata. Sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dengan pola pengembangan

¹²Agus Ananto Widodo, Hesti Lestari, *Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang*, Jurnal of Public Policy and Manajemen, 2016.

¹³Kartini La Ode Unga, I Made Benyamin, dkk, *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda*, 2011.

kepariwisataan yang terencana atau tersusun agar potensi yang di miliki bisa di kembangkan secara optimal. Di dalam memajukan sektor pariwisata di tingkat daerah peran pemerintah daerah adalah sebagai motor penggerak yang selanjutnya memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menentukan strategi-strategi pembangunan kepariwisataan.¹⁴

Dari rujukan di atas, maka terdapat persamaan dalam judul proposal skripsi yang penulis ajukan, dalam hal ini sama-sama mengkaji tentang strategi pengembangan wisata. Namun pembahasannya masih secara umum dan lebih kepada apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata serta pentingnya peran pemerintah daerah. Perbedaannya adalah penulis melihat bagaimana strategi pengembangan potensi wisata alam serta peluang dan tantangan dalam pengembangan potensi wisata alam.

¹⁴ Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto, *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, Hal. 135-14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategoia* (*stratos* = militer, dan *ag* = memimpin), yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Clausewitz., ia menyatakan bahwa strategi merupakan seni pertempuran untuk memenangkan perang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila istilah strategi sering digunakan dalam kancan peperangan. Istilah strategi ini juga pertama kali digunakan di dunia militer. Kata strategi merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi. Secara umum, kita mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan serta memuat suatu rencana jangka panjang dalam mencapai tujuan. Menurut George Steiner strategi juga terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Andrews, strategi digunakan oleh para eksekutif senior untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan kemudian memutuskan strategi yang menyesuaikan antara kompetensi inti perusahaan dan peluang lingkungan.¹⁵

Strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk di dalamnya adalah rencana aksi (*action plans*) untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara eksplisit mempertimbangkan kondisi persaingan dan

¹⁵Rachmat. *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hlm. 2

pengaruh-pengaruh kekuatan di luar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.¹⁶

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁷ Menurut Stoner dan Sirait, ciri-ciri strategi adalah:¹⁸

- a. Wawasan Waktu, yang mana dengan wawasan waktu agar bisa melihat jauh ke depan yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya dalam melaksanakan suatu program
- b. Dampak, merupakan hasil akhir dari strategi yang dijalankan. Meskipun belum pasti terlihat, namun melihat dampak yang akan terjadi penting untuk dilakukan.
- c. Pemusatan Upaya, agar tujuan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif, maka pemusatan upaya sangat diperlukan.
- d. Pola Keputusan, kebanyakan strategi mensyaratkan bahwa sederetan keputusan tertentu harus diambil sepanjang waktu. Keputusan-keputusan tersebut harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.
- e. Peresapan, sebuah strategi mencakup suatu spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan operasi harian. Selain itu, adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan-kegiatan ini

¹⁶ Fred David, *Manajemen Strategi: Konsep dan Teori*, (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006). Hlm. 23

¹⁷ Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 16

¹⁸ Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 18-19

mengharuskan semua tingkatan organisasi bertindak secara naluri dengan cara-cara yang akan memperkuat strategi.

2.2 Teori Pengembangan

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, nilai, moral serta cara tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki.¹⁹ Pengembangan juga dapat diartikan sebagai satu bagian manajemen yang menitik beratkan pada implementasi potensi budaya harus dilaksanakan dengan rentang waktu, berapa langkah sistematis yang dapat mengarah pada pencapaian hasil, dan hasil yang dicapai diharapkan pada perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan visi dari sasaran rencana tersebut. Menurut Lanya, definisi pengembangan adalah memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang telah ada.

Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan, dan oleh karenanya pembahasan tentang masalah pendidikan umumnya dan pelatihan khususnya tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari tujuan, sasaran dan titik berat pembangunan. Dalam Oemar Hamalik (2005) telah digariskan bahwa:²⁰

1. Pembangunan jangka panjang kedua bertujuan mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

¹⁹ <http://digilib.iainkendari.ac.id/124/3/BAB%20II.pdf>. (Diakses pada tanggal 15 Februari 2019).

²⁰ Oemar Hamalik, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm, 2

2. Sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia maju dan mandiri dalam suasana sejahtera lahir batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional (MPR RI, 1993).

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang pokok atau bahkan intinya pembangunan dan dalam hal mana bidang pendidikan dan pelatihan turut memberikan andil. Sedangkan pengembangan pariwisata adalah suatu proses atau cara yang dapat menjadikan sesuatu menuju arah yang lebih baik seperti meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.²¹

Pengembangan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

²¹ Hestanto, Definisi Pariwisata (indikator, pengembangan, objek dan daya tarik), diakses pada <http://googleweblight.com/?u=http://www.hestanto.web.id/definisi-pariwisata-indikator-pengembangan-objek-dan-daya-tarik/%grqid=dpkiJzWS%hl=id-ID> pada tanggal 20 Februari 2019.

Pengembangan pariwisata diharapkan dapat berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dari segi pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.²² Menurut Inskeep, terdapat beberapa komponen pengembangan pariwisata yaitu :²³

1. Atraksi wisata yang mencakup wisata alam, budaya, dan atraksi lainnya.
2. Akomodasi berupa hotel dan jenis fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pelayanan terhadap wisatawan yang menginap.
3. Fasilitas dan pelayanan pariwisata yang berhubungan dengan pelayanan terhadap wisatawan yang menginap
4. Fasilitas dan layanan transportasi yang mencakup transportasi darat, laut dan udara.
5. Infrastruktur lainnya yang terkait dengan pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata menjadi penting agar dapat menjaga kelestarian objek wisata, memperbaiki fasilitas-fasilitas yang disediakan. Apabila objek wisata dirawat dengan sedemikian rupa, fasilitas yang disediakan pada objek wisata yang ada dikembangkan dengan baik, maka tentu akan membuat para wisatawan akan lebih tertarik untuk berkunjung. Menurut Yoeti, keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh tiga faktor yaitu :²⁴

²²Isa Wahyudi. Konsep Pengembangan Pariwisata. Diakses dari <http://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/> pada tanggal 14 Juni 2019).

²³ Andi Maya Purnamasari, *Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddobojo Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 22/No. 1 April 2011, hal 51.

²⁴ Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1983), Hlm. 29.

1. Terdapatnya objek dan daya tarik wisata.

Daya tarik wisata merupakan keindahan, keunikan, keanekaragaman kekayaan alam atau objek tertentu yang memiliki nilai lebih sehingga dapat menjadi sasaran dari wisatawan untuk melakukan kunjungan wisata. Adapun yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam berkunjung seperti pemandangan laut, danau, pantai, air terjun, keanekaragaman flora dan fauna, bangunan-bangunan yang didesain dengan menarik seperti rumah adat, taman bunga, peninggalan sejarah, budaya masyarakat dan lain sebagainya.

2. Adanya aksesibilitas.

Aksesibilitas merupakan salah satu sarana yang penting dalam tumbuh kembangnya industri pariwisata karena dalam hal ini akan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan bagi wisatawan. Pada dasarnya, wisatawan yang berkunjung pada suatu objek wisata tersebut tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja. Tetapi, untuk meningkatnya kenyamanan maka aksesibilitas juga merupakan faktor penting karena berkaitan juga dengan mudah atau sulitnya akses yang ditempuh. Kemudahan akses yang ditempuh oleh wisatawan menjadi perlu untuk diperhatikan karena semakin mudahnya akses yang ditempuh pada suatu objek wisata, maka akan semakin menghemat biaya perjalanan, waktu dan tenaga.

3. Adanya fasilitas.

Fasilitas wisata merupakan segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan baik berupa sarana maupun prasarana wisata yang memiliki peran cukup penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan. Banyaknya

kunjungan wisatawan pada suatu daerah didasari akan adanya fasilitas wisata terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan wisatawan itu sendiri seperti akomodasi, agen perjalanan wisata dan sebagainya.

Menurut Pitana dan Gayatri, ada tiga aktor utama yang berperan dalam pengembangan pariwisata yaitu :²⁵

1. Masyarakat, yaitu masyarakat umum yang tinggal di sekitar objek wisata yang juga merupakan pemilik sah dari berbagai sumber daya modal pariwisata, seperti kebudayaan, tokoh masyarakat, intelektual, LSM serta media massa.
2. Swasta, yaitu seperti asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata.
3. Pemerintah, yaitu mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seterusnya.

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai :²⁶

1. Motivator, dalam pengembangan pariwisata peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Investor serta masyarakat dan pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
2. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah daerah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung

²⁵ <https://eprints.uny.ac.id/18655/6/BAB%20II.pdf>. (Diakses pada tanggal 25 Maret 2019).

²⁶ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/93d524bfc0a07053f57c93cb9c8a5ea7.pdf (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019).

atas program yang diadakan pemerintah. Adapun pada praktiknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak baik itu swasta maupun masyarakat.

3. Dinamisator, dalam pilar good governance untuk dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk menyinergikan ketiga pihak tersebut agar terciptanya suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, yaitu:²⁷

1. Kelangsungan ekologis, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin agar terciptanya pemeliharaan terhadap sumber daya alam yang akan menjadi daya tarik pariwisata.
2. Kelangsungan kehidupan sosial budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat.
3. Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang kompetitif.

²⁷ <http://digilib.unila.ac.id/11405/14/BAB%20II.pdf>. (Diakses pada tanggal 26 Juni 2019).

4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata.

2.3 Teori Pelayanan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.²⁸

Menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.²⁹ Pelayanan merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen pemerintahan modern. Hal ini sesuai dengan pendapat Suriyatna (1999: 37) bahwa masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Selain itu, menurut Moenir (1995: 17) pelayanan adalah proses

²⁸ Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

²⁹ Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Berdasarkan penjelasan tersebut, pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang membentuk suatu proses. Proses pelayanan berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.³⁰

Menurut Thoha (1991: 41), pelayanan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan bantuan kemudahan pada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Birokrasi pemerintah merupakan institusi terdepan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat menjadi penting karena berhubungan dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak.

Dalam konteks ini, birokrasi pemerintah memainkan perannya sebagai institusi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam gugus institusi birokrasi pemerintah pelayanan masyarakat merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang secara langsung memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.³¹

Adapun prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Prinsip Pelayanan Publik adalah:³²

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

³⁰ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 567

³¹ *Ibid.*, hlm, 568-569

³² Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Prinsip Pelayanan Publik

2. Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja serta rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi, produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
6. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
8. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberi pelayanan yang ikhlas.
10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib dan teratur.

Menurut Fitzsimmons, terdapat lima indikator dalam pelayanan publik yaitu:³³

1. *Reliability*, yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. *Tangibles* yang ditandai dengan penyajian yang memadai sumber daya lainnya.
3. *Responsiveness*, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. *Assurance*, yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan.
5. Empati, yang ditandai dengan tekad kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Tolak ukur pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:³⁴

1. Menurut McDonald dan Lawton (1997), tolak ukur pelayanan menyangkut efisiensi dan efektivitas.
2. Menurut Salim dan Woodward (1992), tolak ukur meliputi ekonomi, efisiensi, efektivitas dan keadilan.
3. Menurut Lenvine (1990), tolak ukur pelayanan dapat dilihat dari segi responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

³³ Zaenal Mukarom, Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm, 108

³⁴ *Ibid.*, hlm, 115-116

4. Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990), tolak ukur pelayanan ada 10 yakni ketampakan fisik, reliabilitas, responsivitas, kompetensi, kesopanan, kredibilitas, keamanan, akses, komunikasi dan pengertian.

2.4 Teori Organisasi

Organisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *organization* yang berarti membangun atau membentuk suatu kesatuan dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Dilihat dari segi ini, organisasi bisa berarti organisme yang melakukan *organizing* dan bisa juga berarti keluaran *organizing*. Organisasi dalam bagian ini adalah organisasi sebagai organisme yaitu pusat perhatian teori organisasi. Sasaran studi teori organisasi adalah gejala-gejala keorganisasian yang terdapat dalam masyarakat.³⁵

Secara lebih tepat, organisasi dapat kita definisikan sebagai struktur antar hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang formal dan kebiasaan dalam sistem administrasi. Dalam setiap sistem administrasi pasti ada orang yang memerintah dan yang diperintah, dan dalam rangka pelaksanaan usaha tertentu perintah itu ditaati. Hal ini berarti bahwa ada orang yang mempunyai wewenang yang lebih atas dari yang lainnya, dan ini terjadi dengan adanya hubungan antara memberi perintah dan menaati perintah. Suatu sub bidang baru dari model organisasi adalah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu upaya organisasi ukuran besar yang terencana dari kalangan atas untuk meningkatkan efektivitas dan kelangsungan hidup organisasi dengan melakukan intervensi yang penuh perhitungan atas kerja-kerja organisasi yang aktif dengan menggunakan

³⁵ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 53

pengetahuan ilmu perilaku. Penekanan dari definisi pengembangan organisasi adalah pada perubahan yang terencana, analisis sistemis, manajemen puncak, tujuan untuk mengefektifkan organisasi.³⁶

Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Max Weber dengan mendemonstrasikan pendapatnya mengenai birokrasi. Weber membedakan suatu kelompok kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, kelompok kerja sama adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsinya baik yang dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasi lainnya. Aspek pengertian yang dijelaskan oleh Weber ini adalah bahwa suatu organisasi mempunyai unsur-unsur *properties* sebagai berikut:³⁷

1. Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tersebut.
2. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Dengan demikian, seorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisa membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses interaksi diantara orang-orang yang bekerja sama di dalamnya sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja.

³⁶ *Ibid.*, hlm, 92

³⁷ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm, 166

Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini adalah terdapatnya hierarki. Konsekuensi dari adanya hierarki ini adalah bahwa di dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan maupun staf.

Sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan yang mempengaruhi organisasi, maka timbullah beberapa masalah pokok yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap organisasi di masa-masa yang akan datang. Masalah yang timbul ini akan mengubah corak birokrasi di masa mendatang. Di antara masalah-masalah pokok tersebut antara lain:³⁸

1. Masalah integrasi yang meliputi isu mengenai intensif, penghargaan (reward), dan motivasi dari setiap individu dengan bagaimana usaha organisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut.
 2. Masalah pengaruh sosial (sosial influence). Masalah ini hakikatnya dalam masalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu didistribusikan.
 3. Masalah kolaborasi yang tumbuh dalam rangka mengatasi konflik dan stereotyping, dan kekuatan-kekuatan sentrifugal yang dapat memecah belah kesatuan komunitas.
 4. Masalah adaptasi yang disebabkan karena lingkungan yang tidak menentu.
- Struktur birokrasi yang piramida yang menunjukkan konsentrasi kekuasaan tampaknya sangat sesuai dengan pola organisasi dalam situasi yang stabil.

³⁸ *Ibid.*, hlm, 186

5. Masalah revitalisasi. Di dalam masyarakat yang kontemporer masalah tumbuh dan tenggelam, berkembang dan kehancuran merupakan persoalan-persoalan umum yang terjadi.

2.5 Konsep Objek Wisata Alam

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.³⁹ Pariwisata terdiri atas beberapa komponen diantaranya adalah:⁴⁰

1. Atraksi Wisata

Atraksi wisata dapat diartikan segala sesuatu yang terdapat di daerah wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Sesuatu yang dapat menarik wisatawan meliputi benda-benda tersedia di alam, hasil ciptaan manusia dan tata cara hidup masyarakat.

³⁹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

⁴⁰ Nyoman Pendit, *Ilmu Pariwisata*, (Bandung: PT. Pradnya Paramita, 1990), Hlm. 57.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam pariwisata berkenaan dengan tingkat kemudahan seorang wisatawan mencapai suatu objek wisata. Aksesibilitas penting diperhatikan, mengingat aspek tersebut bisa memberikan pengaruh yang besar bagi para wisatawan. Fasilitas transportasi dalam bidang kepariwisataan sangat erat hubungannya dengan aksesibilitas. Maksudnya frekuensi penggunaan kendaraan yang dimiliki dapat mengakibatkan jarak yang jauh seolah-olah menjadi lebih dekat. Hal ini mempersingkat waktu dan tenaga serta lebih meningkatkan biaya perjalanan.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi aksesibilitas adalah kondisi jalan, tarif angkutan jenis kendaraan, wisatawan yang berkunjung dapat semakin banyak jumlahnya. Sebaliknya, jika aksesibilitasnya kurang baik, wisatawan akan merasakan hambatan dalam kunjungan yang dilakukannya dalam berwisata.

3. Fasilitas

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan objek wisata melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, penginapan, restoran, dan toko cenderamata), transportasi, kendaraan dan lain-lain. Sarana tersebut merupakan kebutuhan penting bagi para wisatawan. Apabila tersedia dengan baik, tentu para wisatawan akan merasa nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik, yang dimana datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak berubah simbol-simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang pada objeknya. Penelitian kualitatif dilakukan dalam keadaan atau situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen) dan dalam memahami serta menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi manusia dalam situasi tertentu hal tersebut menurut perspektif peneliti itu sendiri.⁴¹

3.2 Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif, hal ini karena fokus merupakan pusat titik pusat yang menjadi objek penelitian, bahkan tidak ada satu peneliti pun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Penentuan suatu fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan

⁴¹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006), Hlm. 78

kriteria inklusi-inklusi untuk menjaring informasi yang mengalir masuk. Perumusan fokus penelitian yang tepat membuat peneliti akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian akan dapat berkembang dan berubah sesuai sifatnya yang masih tentative seiring dengan perkembangan masalah yang ditentukan di lokasi penelitian. Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi peneliti sehingga tidak terjebak pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan.⁴² Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya.
2. Peluang dan tantangan dalam pengembangan potensi wisata alam di Kabupaten Aceh Jaya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Kabupaten Aceh Jaya. Adapun alasan peneliti memilih daerah tersebut karena Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup potensial, namun pada proses pengembangannya masih belum maksimal.

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data.⁴³ Berdasarkan sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Data Primer

⁴² Rahel Widiawati Kimbal, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm, 65

⁴³ Muchamad Fauzi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Semarang: Walisongo Pers. 2009). Hlm. 165.

Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dan diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan teknik wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat untuk membantu dalam proses penelitian seperti alat tulis, alat dokumentasi dan alat perekam.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengembangan Potensi Pariwisata.

3.5 Informan Penelitian

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2 Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Asisten II Sekretariat Daerah Kab. Aceh Jaya	1
2	Anggota DPRK Aceh Jaya Komisi A	1
3	Kabid Pariwisata DISPORA Kab. Aceh Jaya	1
4	Duta Wisata Kab. Aceh Jaya.	2
5	Masyarakat Kab. Aceh Jaya	3

Sumber : Di Olah Pada Tahun 2019

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁴⁴ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap subjek penelitian. Dengan menggunakan teknik ini dapat diketahui pola tingkah laku subjek sehingga data dapat diperoleh secara langsung, tanpa pengajuan pertanyaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan lisan yang dijawab secara lisan maupun tulisan kepada informan guna untuk mendapatkan keterangan yang lebih mendalam mengenai sikap, pengetahuan dan perilaku informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Informan atau narasumber merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun mekanisme yang digunakan dalam proses wawancara dilakukan dengan dua bentuk, yang pertama wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan melihat pedoman-pedoman pertanyaan yang telah disusun untuk ditanyakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Sementara wawancara tidak terstruktur dilakukan jika adanya jawaban yang berkembang yang menimbulkan pertanyaan baru dari jawaban tersebut tetapi tetap tidak melenceng dari permasalahan penelitian.

⁴⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2008). Hlm. 308.

3. Studi Pustaka/Dokumentasi

Studi pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian berkaitan dengan strategi pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang beragam teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan hingga selesai di lapangan.⁴⁵ Adapun teknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data, peneliti dituntut harus memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.
2. Tahap penyajian data, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas untuk diteliti.

⁴⁵ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2018), hlm. 53

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat dan terletak di wilayah pantai Barat Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Jaya mulanya dibangun oleh Sultan Saidil Mukawil (1588-1604 M) lalu dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) dengan mendatangkan orang-orang dari Aceh Besar dan Pidie. Kerajaan pertama “Negeri Daya” muncul akhir abad ke -16 M dengan rajanya bernama Sultan Alaidin Riatsyah bergelar Po Teumerehom Daya. Saat ini, kerajaan tersebut berlokasi di Kecamatan Indrajaya. Pada zaman penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Aceh Jaya sekarang ini merupakan onderafdeeling dari Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat), salah satu dari empat afdeeling wilayah Kresidenan Aceh. Afdeeling Westkust van Atjeh merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah pantai barat Aceh dari Gunung Geurute sampai Singkil dan Kepulauan Simeulue.⁴⁶

Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, Wilayah Barat dimekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat terdiri 3 wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue. Wilayah Calang menjadi daerah otonom setelah memekarkan diri dari Kabupaten induk menjadi

⁴⁶ www.acehjayakab.go.id. (Diakses pada tanggal 11 Juni 2019).

Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002.⁴⁷

4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Jaya

Visi :

Mewujudkan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya yang sehat, Kejayaan, Agama, Tangguh, Infrastruktur dan Informatika (Gerbang Raja Sejati).

Misi :

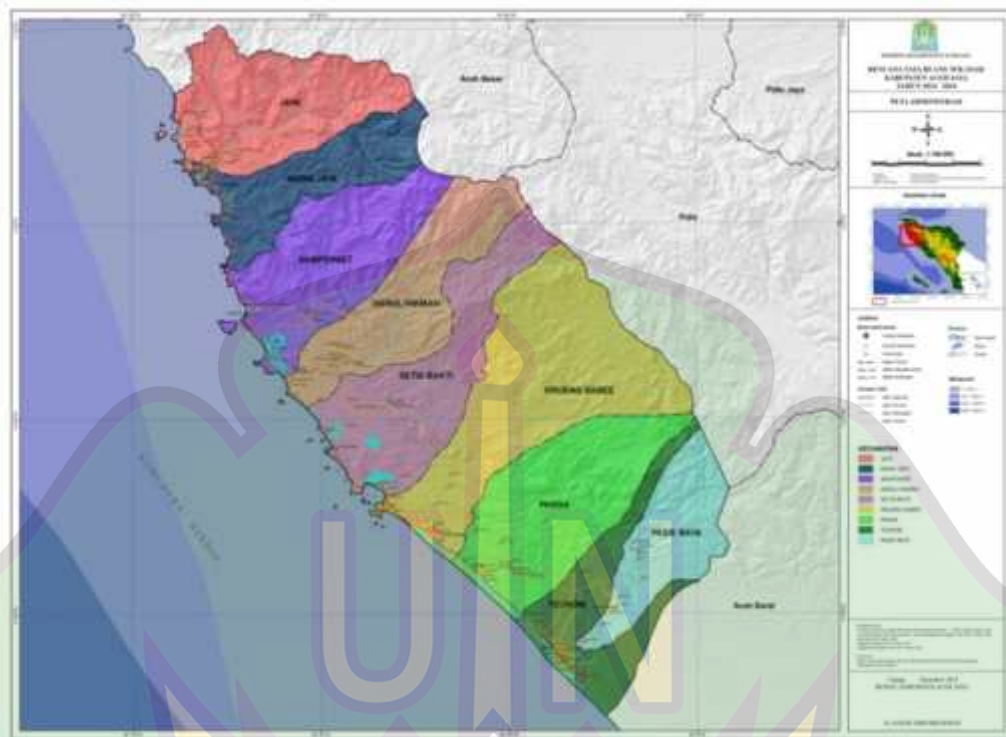
1. Meningkatkan mutu dan mengantarkan pelayanan kesehatan sampai ke rumah masyarakat.
2. Memperketat pertumbuhan ekonomi mikro dan memperbesar akses ekonomi mikro dalam rangka kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor pertumbuhan PDRB.
3. Kejayaan agama dapat ditingkatkan perhatian melalui peningkatan pembangunan pendidikan agama Islam, fasilitas sarana ibadah.
4. Meningkatkan pembangunan yang tangguh di segala bidang, pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengurangan risiko bencana alam dan kerusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan mutu pendidikan termasuk pendidikan umum, sarana dan prasarana dan memperkuat daya kompetensi pembinaan pemuda olahraga serta sosial budaya.
6. Menciptakan good government transparansi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

⁴⁷*Ibid.*

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Aceh Jaya adalah 387.272,36 Ha atau 3.873 Km² dengan Ibukota Kabupaten terletak di Calang. Secara geografis wilayah Kabupaten Aceh Jaya terletak pada lokasi 04⁰22' sampai 05⁰16' LU dan 95⁰10' sampai 96⁰03'BT. Wilayah Aceh Jaya merupakan bagian pantai barat dan daratan Kepulauan Sumatera yang membentang dari Barat ke Timur mulai dari Kaki Gunung Geurute (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Cot Paleng (perbatasan dengan Aceh Barat). Berdasarkan letak geografis wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan: Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie di sebelah Utara, Kabupaten Aceh Barat dan Samudera Hindia di sebelah Selatan, Kabupaten Aceh Barat sebelah Timur dan di sebelah Barat berbatasan dengan Pantai Sumatera.⁴⁸

⁴⁸ Bappeda.acehjayakab.go.id. (Diakses pada tanggal 25 Juni 2019).



Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Jaya

Kabupaten Aceh Jaya terbagi atas 9 (sembilan) wilayah administratif, yaitu Kecamatan Jaya, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Sampoiniet, Kecamatan Darul Hikmah, Kecamatan Setia Bakti, Kecamatan Panga, Kecamatan Krueng Sabee, Kecamatan Teunom dan Kecamatan Pasie Raya. Disamping itu Kabupaten Aceh Jaya juga mempunyai pulau-pulau kecil dengan jumlah kurang lebih 34 (tiga puluh empat) Pulau.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

. Tabel 3 Keadaan Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nama Mukim	Banyaknya		Luas (Ha)
				Gampong	RT	
1	Jaya	Lamno	1. Lamno 2. Lamme 3. Kuala Daya 4. Pante Cermin 5. Keluang	34	-	45,091.46
2	Indra Jaya	Kuta Bahagia	1. Lambesoi 2. Kuala Unga	14	-	29,946.61
3	Sampoiniet	Lhok Kruet	1. Pante Purba 2. Kulam Mutia	19	-	45,040.86
4	Darul Hikmah	Pajar	1. Kuta Baro 2. Lamteungoh	19	-	40,126.6
5	Setia Bakti	Lageun	1. Rigaih 2. Lageun	13	-	47,440.7
6	Krueng sabee	Krueng Sabee	1. Calang 2. Keude Kr.Sabee	16	-	73,051.18
7	Panga	Keudee Panga	1. Panga Pucuk 2. Panga	19	-	50.195,19
8	Teunom	Teunom	1. Keude Teunom 2. Paya Baro	24	-	28,477.83
9	Pasie Raya	Tuwie Kareung	1. Pasi Teubee 2. Sarah Raya	14	-	27,901.93
Jumlah			21 Mukim	172	-	387,272.36

Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Jaya 2016

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Aceh Jaya, selain sembilan kecamatan Kabupaten Aceh Jaya juga memiliki 21 (dua puluh satu) Kemukiman dan 172 (seratus tujuh puluh dua) Desa. Secara geografis seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, jalur panjang garis pantai lebih kurang 156 Kilometer.

4.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Aceh Jaya

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Akhir Tahun 2016, penduduk Kabupaten Aceh Jaya berjumlah 87.622 jiwa yang terdiri dari 45.476 jiwa (51,90 persen) laki-laki dan 42.146 jiwa (48,10 persen) perempuan, sedangkan untuk konsentrasi jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Jaya terdapat di Kecamatan Krueng Sabee dengan proporsi terbesar yaitu 15.937 jiwa (18,19 persen) dan proporsi terendah di Kecamatan Darul Hikmah yaitu 6.537 jiwa (7,46 persen). Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Jaya menurut jenis kelamin adalah 51,90 persen laki-laki dan 48,10 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Aceh Jaya lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan seperti tampak dari rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 persen. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.⁵⁰

Komposisi penduduk Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 menurut kelompok umur didominasi oleh kelompok umur 25-59 tahun sebesar 41.804 jiwa (47,71persen) usia anak-anak sampai usia remaja (0 - 24 tahun) tercatat 40.134 jiwa (45,80 persen), dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 5.684 jiwa (6,49 persen). Kecilnya proporsi usia lanjut menunjukkan relatif masih rendahnya Angka Harapan Hidup.⁵¹

⁵⁰<http://acehjayakab.bps.go.id> . (Diakses pada tanggal 25 Juni 2019).

⁵¹*Ibid.*

4.2 Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam

Sebagai salah satu sektor andalan pembangunan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Aspek ekonomis sebagai aspek yang dianggap penting dan menjadi perhatian paling besar dalam sektor pariwisata karena banyak efek yang diperoleh dalam perjalanan wisata karena adanya biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan, sedangkan efek yang diperoleh bagi daerah objek wisata itu berasal yaitu dapat menerima uang atau pemasukan dari wisatawan tersebut melalui orang-orang yang menyediakan berbagai jasa seperti angkutan, akomodasi, ragam makanan, atraksi dan sebagainya. Keuntungan ekonomis ini merupakan salah satu dari tujuan pengembangan wisata.

Sektor pariwisata saat ini sudah mampu menyejahterakan masyarakat dan secara tidak langsung ikut mengentaskan kemiskinan dimana dapat kita lihat pada persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,46 persen poin terhadap September 2017. Selain itu, saat ini sektor pariwisata memiliki peranan cukup besar yang kontribusi nya tersebut juga sudah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2019 terhadap triwulan I-2018 tumbuh sebesar 5,07 persen meningkat dari pada capaian nya pada triwulan I-2018 yang sebesar 5,06 persen.⁵²

Sektor pariwisata di Indonesia telah mengalami peningkatan dari sebelumnya dalam kontribusi nya terhadap perekonomian negara yang saat ini mencapai 8,4%.

⁵² Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan yang di alami ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang terbesar di antara Negara-negara anggota G20, hal ini dibuktikan sesuai hasil riset *World Travel and Tourism Council* (WTTC), otoritas global dalam industry perjalanan dan Pariwisata. *Economic Impact Report tahun 2014* yang dikeluarkan oleh *World Travel and Tourism Council* (WTTC) yang menunjukkan bahwa di Indonesia telah berhasil mencapai pertumbuhan pengunjung Internasional sebanyak 15,1% dan pertumbuhan ekonomi 7,2%. Bahkan menurut catatan Badan Pusat Statistik pusat, jumlah kumulatif (Januari–Agustus 2018) kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,58 juta kunjungan atau naik 12,30 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2017 yang berjumlah 9,42 juta kunjungan.⁵³

Sebagai sektor ekonomi penting, pariwisata mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan merupakan dasar pijakan penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan. Dalam Undang-undang tersebut disampaikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan yaitu:⁵⁴

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menurunkan angka kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran dan penyediaan lapangan pekerjaan;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan dan melestarikan nilai budaya;

⁵³WTC. Pariwisata Indonesia Tumbuh Paling Tinggi. Diakses dari <https://googleweblight.com/i?u=https://industri.kontan.co.id/news/wttc-pariwisata-indonesia-tumbuh-paling-tinggi&grqid=ygpUTQA5&s=1&hl=en-ID> pada tanggal 21 Juni 2019.

⁵⁴ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

- g. Mengangkat citra bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air;
- h. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan ;
- i. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional yang terdapat pada Pasal 1 bahwa pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.⁵⁵ Kabupaten Aceh Jaya memiliki beragam potensi pariwisata salah satu yang dominan berasal dari objek wisata alam. Adapun objek wisata alam sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini.⁵⁶

⁵⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

⁵⁶Syafrizal, Tesis: *“Model Integratif Eksplorasi Variabel Smart Tourism Technology Attribute dan Percieved Value Destination terhadap Intention Revisit melalui Exploitative Use of Smart Technology dengan Length of Stay sebagai Pemoderasi pada Wisata Alam Aceh Jaya ”* (Banda Aceh: Unsyiah, 2019), hal. 15.

Tabel 4 Nama Objek Wisata Alam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018

No	Nama Objek Wisata Alam
1	Air Terjun Alue Bed
2	Air Terjun Batee Patah
3	Air Terjun Ceuraceu Embon
4	Air Terjun Dua Rungkha
5	Air Terjun Pucok Alue Sampan
6	Air Terjun sp. 4
7	Aron Meubanja
8	Arung Jeram Krueng Sikuleeh
9	Air Terjun Ceuraceu Imbon
10	Concrank Hills
11	Ceurace Alue Minyek sapi
12	Danau Laot Nie Pineung Suasa
13	Danau Laut Bhee
14	Ekowisata Pante Ceurmen
15	Guha Sayeung Teurbang
16	Guha Teukabo
17	Guha Teumiga
18	Gunong Bom
19	Gunong Carak
20	Gunong Keumala
21	Gunong Kual
22	Gunong Seumadem (Gunung Piramida)
23	Ie Terjun Bate Gajah
24	Kawasan Kuliner Gunong Ceuncrang
25	Kawasan Eko Park Ulu Masen
26	Kuala Dho (Dawot Jerman)
27	Kuala Krueng Teunom
28	Lhok Geulumpang
29	Mon Toejoh
30	Panorama Batee Tutong
31	Pantai Lhok Maneh
32	Pasi Luah
33	Pantai Lueng Gayo
34	Pantai Pasie Saka
35	Pantai Tulak Bala
36	Pante Ceumara Lancang Sira
37	Pulo Keuh
38	Pulo Raya
39	Pulo Reusam
40	Pulo Keluang
41	Pulo Tsunami Ujong Seudheun
42	Puncak Geurute

43	Pesona Krueng Lageun
44	Rawa Pengapet
45	Teluk Calang
46	Teluk Lhok Kubu
47	Teluk Rigaih
48	Tuwi Kareung
49	Ujong Baroh Hills
50	Ujong Pusong Lhok Buya
51	Ujong Seurangga
52	Pulo Keueh
53	Batee Nahkoda Tgk. Maien

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh

Ragam objek wisata yang dimiliki Aceh Jaya tersebut, maka pengembangan wisata perlu digarap dengan serius dan terus dimaksimalkan agar memperbaiki performa wisata menjadi lebih menarik dan berkualitas agar ke depan target yang ingin dicapai akan terwujud dan kunjungan semakin meningkat tentunya dengan cara menyusun strategi-strategi yang tepat untuk mendukung berjalannya pengembangan wisata. Strategi menjadi penting dalam pengembangan wisata karena dengan adanya strategi kita dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan yaitu berkembangnya wisata dengan optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah menyusun strategi dalam pengembangan wisata. Strategi yang sudah disusun tersebut tercantum dalam Rencana strategis (Renstra) Dispora Kabupaten Aceh Jaya. Renstra Dispora Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMK Aceh Jaya tahun 2017 - 2022 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPK Aceh Jaya tahun 2005-2025.

Penyusunan Renstra bertujuan agar terwujudnya pembinaan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing melalui kelembagaan kepemudaan yang partisipatif dalam pembangunan daerah. Untuk bidang kepariwisataan penyusunan

Renstra bertujuan untuk mewujudkan kemandirian rakyat, dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun strategi yang dilakukan oleh Dispora khususnya bidang pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan pemasaran wisata

Dispora Kabupaten Aceh Jaya dalam mengembangkan potensi wisata membuat program pengembangan pemasaran wisata guna memperkenalkan potensi wisata kepada masyarakat luas salah satunya dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran wisata. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora Kabupaten Aceh Jaya mengatakan bahwa strategi yang dilakukan adalah dengan cara mempromosikan potensi yang ada melalui berbagai media baik media cetak, media massa maupun media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita berada di era digital yang jika kita bisa memanfaatkannya dengan tepat tentu potensi wisata yang ada di Kabupaten Aceh Jaya dapat dikenal tidak hanya di daerah sendiri tetapi hingga mancanegara.⁵⁷

Kemudian melakukan pemeliharaan terhadap website promosi wisata daerah serta melakukan pengembangan jaringan kerja sama promosi wisata dalam hal ini dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). POKDARWIS merupakan lembaga di tingkat masyarakat yang dibentuk untuk menjadi penggerak dalam mendukung berkembangnya wisata. Anggota yang tergabung di dalamnya merupakan putra-putri daerah yang merupakan para

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora, pada tanggal 28 Juni 2019.

pelaku dan pegiat wisata yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap pengembangan wisata. Dengan keberadaan mereka ini sangat membantu untuk mempromosikan wisata daerah sehingga dapat lebih dikenal oleh luar.⁵⁸

Dalam mempromosikan potensi wisata Kabupaten Aceh Jaya saat ini memang lebih dominan melalui media sosial. Hal ini sesuai wawancara peneliti dengan Duta Wisata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 yang saat ini aktif mempromosikan wisata Aceh Jaya melalui media sosial *Instagram* yang dibuat dan dikelola oleh beliau pribadi yang nama akun nya yaitu “@Exploremereuhomdaya”.⁵⁹

Pemeliharaan website sangat bermanfaat bagi wisatawan dalam memperoleh informasi terhadap objek wisata yang akan dikunjungi. Namun, hal ini tidak sejalan dengan apa yang tertuang dalam program diatas. Seperti wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat beliau mengatakan bahwa untuk mengetahui keberadaan objek wisata saat ini sedikit susah karena saat membuka akses di website resmi tidak memuat informasi apapun yang menerangkan keberadaan letak objek wisata secara menyeluruh. Sehingga beliau saat melakukan perjalanan wisata hanya bermodalkan pengetahuan antar sesama masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa salah satu masyarakat mendapat kesulitan dalam mengakses website resmi Dispora untuk memperoleh informasi tentang keberadaan letak objek wisata. Di sini terlihat jelas bahwa

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Wawancara dengan Duta Wisata Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017, pada tanggal 5 Juli 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 5 Juli 2019.

program yang telah diterapkan oleh Dispora Kabupaten Aceh Jaya masih belum efektif dalam melakukan pengembangan pemasaran wisata.

2. Mengembangkan destinasi wisata

Untuk menarik minat wisatawan dalam berkunjung, maka Dispora dalam hal ini mengembangkan destinasi wisata agar menjadikan objek wisata Kabupaten Aceh Jaya menjadi daerah tujuan wisata. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora Kabupaten Aceh Jaya yang mengatakan bahwa akan melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan jenis dan paket wisata unggulan.⁶¹

Hal serupa juga ikut disampaikan saat wawancara peneliti dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya bahwa salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengembangan destinasi wisata yaitu dengan cara mengembangkan potensi wisata unggulan. Hal tersebut diwujudkan melalui adanya kemudahan dalam hal perizinan melalui terjalinnya kerjasama dengan stakeholder terkait dalam upaya pengembangan objek wisata unggulan.⁶²

Berikut wawancara peneliti dengan anggota DPRK Aceh Jaya Komisi A, yang memiliki jabatan sebagai ketua bahwa pemerintah dalam hal ini baik eksekutif dan legislatif sama-sama ikut bekerja sama dalam mengembangkan destinasi wisata. Bahkan untuk mengetahui seberapa jauh pengembangan wisata yang telah dilakukan, setiap 6 bulan sekali beliau akan meminta pihak Dispora untuk menyampaikan bagaimana perkembangan yang sudah dilakukan sekaligus

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora, pada tanggal 28 Juni 2019

⁶² Wawancara dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya, pada tanggal 27 Juni 2019.

mengevaluasi perihal tersebut dengan ikut melibatkan pegiat wisata di Aceh Jaya.⁶³

Dari analisis peneliti, upaya yang dilakukan pemerintah terutama dalam pengembangan destinasi wisata sudah cukup membantu untuk wisata Kabupaten Aceh Jaya itu sendiri. Tetapi pada proses pengimplementasian nya, hal tersebut masih belum optimal, seperti hasil wawancara antara peneliti dengan masyarakat yaitu yang mengatakan bahwa pada objek wisata seperti Pulo Keluang masih sangat terbatas dari ketersediaan sarana dan prasarannya terutama seperti MCK, Mushalla, *Tour Guide* sehingga wisatawan yang berkunjung kesana hanya menikmati keindahan alamnya saja seperti *swimming* dan *snorkeling*.⁶⁴ Berikut tabel ketersediaan fasilitas baik sarana dan prasarannya yang terdapat pada Pulo Keluang:

Tabel 5 Fasilitas yang Tersedia Pada Objek Wisata Pulo Keluang

No	Nama Objek Wisata Alam	Fasilitas yang Tersedia	Jumlah
1	Pulo Keluang	• Perahu nelayan berkapasitas 6-8 orang	5
		• Speed boat	1

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah berupaya dalam melakukan pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi unggulan, melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana serta menjalin hubungan kerja sama antara pemangku kepentingan terkait. Tetapi hal tersebut

⁶³ Wawancara dengan Anggota DPRK Komisi A, pada tanggal 22 Juli 2019.

⁶⁴ Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 6 Juli 2019.

belum menunjukkan keberhasilan salah satunya masih belum memadai sarana dan prasarana pariwisata yang dibutuhkan pada objek wisata terutama yang terdapat pada Pulo Keluang.

3. Melakukan pengembangan kemitraan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.⁶⁵

Dalam pengelolaan suatu daya tarik wisata sangat diperlukan kemitraan karena suatu daya tarik wisata akan berkembang ketika melibatkan stakeholder yang memiliki perencanaan yang baik dalam mengembangkan suatu daya tarik wisata. Alasan adanya kemitraan yaitu memberikan peluang kepada para stakeholder yang ingin terlibat langsung dalam pengembangan wisata. Selain itu, juga dapat menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi untuk masyarakat setempat dan hal ini tentunya akan menimbulkan efek yang dapat menguntungkan semua pihak akan adanya objek wisata.⁶⁶

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora, yang mengatakan bahwa saat ini kegiatan yang dilakukan Dispora Kabupaten Aceh Jaya dalam menjalankan program untuk mengembangkan

⁶⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

⁶⁶ Tradventure Makassar. Bentuk-bentuk Edukasi, Kemitraan dan Kerjasama dalam Memasarkan Bola Pitue. Diakses dari <http://googleweblight.com/i?uhttps://tradventuremakassar.wordpress.com/2016/06/08/bentuk-bentuk-edukasi-dan-kemitraan-dan-kerjasama-dalam-memasarkan-bola-pitue/%grqidid=-vH-gAlI&hl=en-ID> pada tanggal 20 Juni 2019.

kemitraan ini adalah memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku wisata dengan mengikuti pelatihan tenaga ahli bidang kepariwisataan, mengembangkan sumber daya manusia dalam pengelolaan bidang wisata serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan wisata yang melibatkan para pemangku kepentingan.⁶⁷

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya yaitu jalinan kerja sama atau kemitraan yang dilakukan saat ini adalah antara pemerintah dan masyarakat dapat dilihat melalui terbukanya Taman Celocia Garden. Taman ini di gagas oleh salah satu masyarakat yang berasal dari Desa Alue Pit, Kecamatan Panga. Saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah membantu dalam mengurus perizinan berdirinya taman bunga tersebut, selain itu Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga akan membantu dalam bentuk material baik melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kelautan serta Pariwisata. Adapun pengembangan yang akan dilakukan melalui SKPK terkait seperti pemberian bibit bunga lain, pembuatan kolam ikan, fasilitas untuk berteduh dengan perpaduan miniatur kincir angin, miniatur Kota Sidney yang nantinya diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Maka oleh karenanya, pengembangan tersebut akan terus dilakukan karena selain menguntungkan masyarakat, melalui terbukanya taman bunga ini juga menguntungkan daerah kita dengan meningkatnya PAD.⁶⁸

Menurut pemilik Taman Bunga Celocia Garden, inisiatif untuk membukanya taman ini adalah semata-mata untuk membangun daerahnya sekaligus

⁶⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora, pada tanggal 28 Juni 2019

⁶⁸ Wawancara dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya, pada tanggal 27 Juni 2019.

menciptakan objek wisata baru berbentuk taman yang bisa dikunjungi oleh orang banyak dari segala jenis usia. Tetapi, untuk mewujudkan impiannya tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak yang lain dan tidak pernah mendapatkan pelatihan apapun dari pemerintah terkait. Bahkan beliau harus rela merogoh kantongnya hingga ratusan juta rupiah untuk membudidayakan bunga tersebut. Hanya berbekal pengalaman menjadi tour guide di beberapa negara, bapak Kaisar melirik cara budidaya bunga Celosia dari petani Pattaya, Satun, Phuket di Thailand. Mulai Januari tahun 2019 taman ini dibuka, selain pengurusan perizinan hingga saat ini bantuan yang pernah disampaikan pihak pemerintah belum menuai kejelasan apapun. Besar harapan beliau agar pemerintah tidak tinggal diam dan melihat potensi wisata di daerahnya agar taman bunga ini tidak hanya menjadi objek wisata sesaat, namun bisa tetap berkembang dan bertahan sehingga dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang tetap di Kabupaten Aceh Jaya.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan kemitraan yang menjadi salah satu program pemerintah khususnya Dispora Kabupaten Aceh Jaya saat ini belum terealisasi dengan tepat sehingga program yang dibuat masih memerlukan evaluasi untuk memaksimalkan tujuan yang hendak dicapai salah satunya dapat memberikan dampak positif yang dapat diterima oleh masyarakat melalui kemitraan yang dilakukan.

⁶⁹ Wawancara dengan pemilik Taman Bunga Celocia Garden, pada tanggal 10 Juli 2019.

Untuk melihat tingkat keberhasilan pengembangan wisata, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Yoeti bahwa faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wisata adalah:⁷⁰

1. Tersedianya objek dan daya tarik wisata

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran kunjungan wisatawan.⁷¹ Daya tarik wisata menjadi salah satu penentu banyaknya kunjungan wisatawan. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya sudah tersedia yang terdiri dari 57 objek wisata.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk melakukan kunjungan, salah satunya yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Jaya adalah objek wisata yang memiliki keunikan yaitu seperti Pulau Keluang. Oleh karena itu, saat ini Kabupaten Aceh Jaya sudah memenuhi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wisata yaitu dengan tersedianya objek wisata dan daya tarik wisata.

2. Adanya aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan salah satu ukuran tingkat kenyamanan yang berkaitan dengan mudah atau sulitnya seseorang dalam mencapai lokasi tertentu.⁷²

Dalam industri pariwisata, aksesibilitas memberikan pengaruh yang cukup besar

⁷⁰ Oka Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1983), Hlm. 29.

⁷¹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

⁷² Adisasmita Raharjo. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012). Hlm 124-125.

terhadap pengembangan wisata terutama yang berkenaan dengan transportasi. Dengan adanya transportasi maka jarak yang akan ditempuh akan lebih dekat sehingga dapat menghemat waktu perjalanan sekaligus menekan biaya perjalanan.

Berdasarkan hasil observasi, saat ini aksesibilitas yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya masih belum terintegrasi dengan baik karena masih banyak akses jalan menuju lokasi wisata yang masih rusak dan tidak beraspal terutama pada lokasi objek wisata di pedalaman, sarana komunikasi yang tidak dapat diakses pada beberapa objek wisata seperti pada objek wisata yang terdapat di CRU Sampoiniet. Selain itu, infrastruktur juga masih kurang dan saat ini pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sedang fokus memperbaiki hal tersebut guna dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan berkunjung ke depan.

3. Adanya fasilitas

Keberhasilan pengembangan pariwisata salah satunya sangat tergantung pada kelengkapan fasilitas wisata. Fasilitas wisata dalam hal ini berkenaan dengan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Pada saat berkunjung pada objek wisata, wisatawan tidak hanya sekedar menikmati keindahan alam yang ada namun juga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang di dalamnya.⁷³ Ketersediaan sarana dan prasarana dalam proses pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya masih belum memadai karena masih terdapat banyak kekurangan seperti kurangnya tempat penginapan, restoran, toko cenderamata, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Hal tersebut merupakan kebutuhan penting bagi para wisatawan karena ketersediaan sarana

⁷³Tugi Wudi. Apa Itu Amenitas dalam Kepariwisata. (Diakses dari <http://googleweblight.com/i?u=http://swaragunungkidul.com/apa-itu-amenitas-dalam-kepariwisataan/&grqid=oriRpjDz&hl=en-ID> pada tanggal 5 Juli 2019).

dan prasarana dengan lengkap akan menimbulkan kenyamanan bagi wisatawan yang memungkinkan untuk adanya kunjungan ulang yang akan dilakukan. Oleh karena itu, maka pengembangan potensi wisata di Kabupaten Aceh Jaya hanya memenuhi satu faktor keberhasilan pengembangan wisata yaitu terdapatnya objek dan daya tarik wisata.

4.2.1 Peluang dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam

Keanekaragaman potensi wisata yang dimiliki merupakan modal utama dalam berkembangnya suatu daerah. Melalui hal tersebut maka dapat menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan secara signifikan agar dapat memperoleh keuntungan. Peluang yang dapat diperoleh dari adanya potensi wisata seperti peluang ekonomi melalui usaha-usaha jasa pariwisata maupun bisnis atau investasi dan lain sebagainya yang akan bermanfaat bagi semua pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora, bahwa dengan panjang garis pantai sejauh 156 Km, Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi wisata yang besar dan berpeluang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan, terutama wisata bahari yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dalam negeri. Hal ini tentu menjadi peluang bagi Kabupaten Aceh Jaya yang nantinya akan dikenal oleh wisatawan banyak.⁷⁴

Wawancara lainnya juga dilakukan oleh peneliti dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya yang mengatakan bahwa dengan berkembangnya objek wisata tentu PAD

⁷⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora, pada tanggal 28 Juni 2019.

akan meningkat. Selain PAD daerah, potensi wisata juga akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat setempat, dapat menampung tenaga kerja yang hal tersebut nantinya akan mempengaruhi pembentukan Product Domestic Regional Bruto (PDRB).⁷⁵

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Duta Wisata Aceh Jaya Tahun 2016 bahwa peluang yang bisa diangkat dari adanya potensi wisata Aceh Jaya terutama terdapat pada objek wisata bahari. Potensi wisata bahari tersebut bisa menjadi peluang ekonomi, karena banyak tempat-tempat yang memiliki nilai jual tinggi. Jika itu bisa dikelola dengan tepat, otomatis ekonomi itu akan bergerak apalagi sektor wisata itu bisa menjadi penggerak sektor lainnya.⁷⁶

Berikut wawancara peneliti dengan masyarakat yang ada pada objek wisata yang mengatakan bahwa memang benar adanya wisata dapat membuka peluang usaha terutama bagi masyarakat di sekitar objek itu sendiri. Dengan terbukanya objek wisata, maka akan membantu mereka sebagai masyarakat ikut serta dalam mengelolanya baik ikut berpartisipasi menjadi tour guide, membuka kios kecil-kecilan, menyewakan alat transportasi dan sebagainya.⁷⁷

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peluang yang dapat dimanfaatkan karena keberadaan potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya adalah peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekaligus juga dapat meningkatkan PAD. Tidak hanya itu, peluang lainnya yaitu potensi pariwisata Kabupaten Aceh Jaya berpotensi menjadi potensi wisata unggulan.

⁷⁵ Wawancara dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya, pada tanggal 27 Juni 2019.

⁷⁶ Wawancara dengan Duta Wisata Aceh Jaya Tahun 2016, pada tanggal 2 Juli 2019.

⁷⁷ Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 5 Juli 2019.

4.2.2 Tantangan Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pariwisata

Tantangan merupakan faktor utama yang harus ditempuh untuk dapat mencapai suatu tujuan yang dimaksud. Faktor ini merupakan suatu hal yang menjadi rintangan dalam pencapaian suatu tujuan baik tujuan individu maupun kelompok. Jika kita hubungkan dengan pengembangan potensi wisata, maka tantangan yang dihadapi haruslah segera dipecahkan. Setelah melakukan penelitian, Kabupaten Aceh Jaya mendapati beberapa tantangan dalam pencapaian tujuannya untuk pengembangan potensi wisata.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan anggota DPRK Komisi A yang mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan potensi wisata di Aceh Jaya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai potensi wisata. Persepsi masyarakat yang negatif menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan potensi wisata, pasalnya masyarakat sampai saat ini masih memiliki pandangan yang kurang positif terhadap pengembangan wisata. Kebanyakan masyarakatnya masih belum sadar wisata, jadi untuk mengembangkannya menjadi sulit karena mendapat beragam penolakan. Padahal, jika kita melihat lebih jauh bahwa potensi wisata yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan seperti peningkatan ekonomi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.⁷⁸

Kemudian belum rampungnya nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pariwisata, Qanun Wisata Halal serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). RIPPARDA saat ini juga dalam tahap proses perancangan, hal ini menjadi penting dan tantangan tersendiri karena nantinya akan

⁷⁸ Wawancara dengan Anggota DPRK Komisi A, pada tanggal 22 Juli 2019.

menjadi acuan atau pedoman dalam perencanaan pembangunan wisata di daerah tentunya berdasarkan potensi-potensi yang kita miliki.⁷⁹

Hal serupa juga dikemukakan berdasarkan wawancara peneliti dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya bahwa tantangan yang dialami dalam pengembangan potensi wisata di Aceh Jaya juga tidak jauh berbeda, masyarakat juga tantangan utama yang dialami selama proses pengembangan potensi wisata. Tantangan tersebut sudah di atasi dengan diselenggarakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak positif yang dihasilkan dari adanya potensi wisata.⁸⁰

Kemudian yang menjadi tantangan lainnya yaitu terhadap perencanaan yang belum terintegrasi pada program-program yang sudah dibuat. Saat membuat perencanaan seringkali tidak tepat sasaran. Misalnya pada saat membuat program pembangunan jalan tapi program tersebut tidak tepat sasaran sehingga sulit diwujudkan percepatan pembangunannya. Maka oleh sebab itu ke depan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya akan membuat semacam pembahasan program yang terintegrasi (*integrated control*) agar lebih fokus terhadap sasaran yang dituju sehingga program yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif.⁸¹

Sedangkan menurut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pariwisata bahwa tantangan yang dihadapi adalah seperti terbatasnya aksesibilitas, fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk menunjang destinasi wisata unggulan daerah, belum optimalnya sumber daya manusia (SDM) dalam hal promosi dan pemasaran wisata sehingga berimplikasi pada masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan, lokasi wisata yang masih dipenuhi sampah plastik serta toilet yang jorok serta dana

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Wawancara dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya, pada tanggal 27 Juni 2019.

⁸¹ *Ibid.*

yang minim untuk pembangunan infrastruktur pendukung dan fasilitas wisata sehingga banyaknya potensi wisata yang belum dibenahi secara terpadu.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat melihat bahwa tantangan dalam pengembangan potensi wisata di Aceh Jaya terdapat pada rendahnya kualitas pemahaman masyarakat sekitar akan pentingnya potensi wisata untuk dikembangkan dengan benar sehingga akan berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sudah melakukan sosialisasi untuk mengubah pemahaman negatif tersebut ke arah yang lebih positif, belum rampungnya nomenklatur SOTK pariwisata, Qanun Wisata Halal dan RIPPARDA, perencanaan yang belum terintegrasi dengan baik, terbatasnya aksesibilitas fasilitas dan infrastruktur pendukung, belum optimalnya SDM yang ada, lokasi wisata yang belum bersih, kurangnya anggaran juga menjadi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan potensi wisata.

⁸² Wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata di Dispora, pada tanggal 28 Juni 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengembangan potensi wisata dalam hal ini tertuang pada Renstra Dispora Kabupaten Aceh Jaya yaitu melakukan pengembangan pemasaran wisata, melakukan pengembangan destinasi wisata serta melakukan pengembangan kemitraan. Dari keseluruhan program tersebut, saat ini masih belum berjalan dengan efektif. Untuk melihat tingkat keberhasilan pengembangan pariwisata, menurut Yoeti harus memenuhi tiga faktor yaitu terdapatnya objek dan daya tarik wisata, adanya aksesibilitas dan adanya fasilitas. Namun, dari ketiga faktor tersebut Kabupaten Aceh Jaya hanya memenuhi satu faktor saja yaitu tersedianya objek dan daya tarik wisata.
2. Peluang yang dapat diperoleh terhadap adanya potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya merupakan peluang usaha dimana potensi tersebut dapat dimanfaatkan terutama oleh masyarakat untuk membantu menambah pendapatan melalui terbukanya lapangan kerja di area objek wisata. Selain dapat membantu perekonomian masyarakat, peluang yang dapat diambil dari adanya potensi wisata adalah peningkatan PAD serta dapat berpeluang menjadi destinasi wisata unggulan. Sedangkan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangan potensi pariwisata yaitu terdapat pada negatifnya

persepsi ataupun *mindset* dari masyarakat, perencanaan yang belum terintegrasi dengan baik, terbatasnya aksesibilitas fasilitas dan infrastruktur pendukung, belum optimalnya SDM yang ada, lokasi wisata yang belum bersih, kurangnya anggaran serta belum rampungnya nomenklatur SOTK pariwisata, Qanun Wisata Halal dan RIPPARDA.

5.2 Saran

1. Pariwisata memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu diperlukannya beberapa strategi yang tepat untuk terus mengembangkan potensi pariwisata yang ada khususnya Kabupaten Aceh Jaya. Untuk mengetahui capaian strategi yang diterapkan efektif atau tidak, mestinya pemerintah terkait melakukan evaluasi terhadap faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pencapaian sehingga dapat diperbaiki menjadi lebih optimal.
2. Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam kemajuan sektor pariwisata. Masyarakat perlu memahami akan pentingnya kesadaran tentang potensi pariwisata, bahwa masyarakat perlu menjaga lingkungan wisata, menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan serta selalu aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan potensi pariwisata agar ke depan pariwisata Aceh Jaya dapat berkembang dengan baik sehingga menjadi salah satu sektor yang mampu meningkatkan perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofjan , 2010, *Strategic Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bastian, Radis , 2015, *Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- David, Fred, 2006, *Manajemen Strategi: Konsep dan Teori*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Fauzi, Muchamad, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Pers.
- Hamdani, 2011, *Strategi Belajar Mengajar*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kansil dan Christine Kansil, 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kencana, Inu Syafiie, 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mulyana, Yaya Aziz dan Syarief Hidayat, 2016, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pendit, Nyoman, 1990, *Ilmu Pariwisata*, Bandung: PT. Pradnya Paramita.
- Pitana, Gde, 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi.
- Raharjo, Adisasmita, 2012, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rachmat, 2013, *Manajemen Strategik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rachmat dan Dadang Gunawan, 2016, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Pustaka Setia.

Rosidin, Utang, 2015, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Sahid, Asep, Gatara dan Subhan Sofhian, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung: Fokus Media.

Supriadi, Bambang dan Nanny Roedjinandari, 2017, *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*, Malang: Universitas Negeri Malang.

Supriyanto, Bambang, 2017, *Ekonomi Publik: Konsep dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Manajemen Pemerintah*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Syafiie, Inu Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tjiptono, Fandi, 2015, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi.

Umar, Husein, 2013, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Umar, Husein, 2001, *Strategic Manajemen In Action*, Jakarta: PT Gramedia Utama.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widjaja, HAW, 2008, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yoeti, Oka, 1983, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata

SKRIPSI DAN JURNAL

Aditya Yuli, 2011, *City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau Dari Aspek Hukum Merek*. Jurnal Ilmu Hukum QISTI Vol. 5 No. 1 Januari.

Anita Asri, 2006, *Laporan Praktik Kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Universitas Widyatama.

Agus Ananto Widodo, Hesti Lestari, 2016, *Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang*, Jurnal of Public Policy and Manajemen.

Andi Maya Purnamasari, 2011, *Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 22.

Andri Mahfudi, *Strategi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Di Sektor Pariwisata.*, Jurnal Penelitian Administrasi Publik e-IS2460-1586 Vol.

Deddy Prasetya Maha Rani, 2014, *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur*, Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember.

Faris Zakaria, 2014, *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Teknik Pomits Vol. 3, No.2.

Kartini La Ode Unga, I Made Benyamin, dkk. 2011, *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda*.

Reza Kurnia Putri, 2015, *Pembangunan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bukit Tinggi untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, Riyanto, 2013, *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4.

Syafrizal, 2019. *Model Itegratif Eksplorasi Variabel Smart Tourism Technology Attribute dan Percieved Value Destination terhadap Intention Revisit melalui Exploitative Use of Smart Technology dengan Length of Stay sebagai Pemoderasi pada Wisata Alam Aceh Jaya*. Tesis. Unsyiah. Banda Aceh.

Untung Dwi Hananto, 2011, *Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, MMH, Jilid 40 No. 2 April.

INTERNET/WEBSITE RESMI PEMERINTAH:

Bappeda.acehjayakab.go.id. (Diakses pada tanggal 25 Juni 2019).

Badan Pusat Statistik(BPS). *Aceh Jaya dalam Angka 2017*. Badan Pusat Statistik Aceh Jaya. (<https://acehjayakab.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2017&Publikasi%5BkataKunci%5D=aceh+jaya+dalam+angka&yt0=Tampilkan>). (Diakses pada tanggal 7 April 2019).

Ferry Dwi Cahyono. *Mengembangkan Potensi Diri*. Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/22531/4/4.%20bab%202.pdf> pada tanggal 16 April 2019

Hasanah Sovia. *Arti dan Maksud Tugas Pembantuan Pemerintah*. 2. Diakses dari <https://googleweblight.com/i?u=https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt58b4dd94d9b04/arti-dan-maksud-tugas-pembantuan-pemerintah/&grqid=NhIgYeLB&s=1&hl=en-ID> pada tanggal 26 Januari 2019.

Isa Wahyudi. *Konsep Pengembangan Pariwisata*. Diakses dari <http://cvinspireconsulting.com/konsep-pengembangan-pariwisata/> pada tanggal 14 Juni 2019.

Pemerintah Kabupaten Bandung. *Tupoksi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata*. 2013. (<http://www.bandungkab.go.id/arsip/tupoksi-dinas-pemuda-olah-raga-dan-pariwisata>). (Diakses pada tanggal 20 Februari 2019).

Tugi Wudi. *Apa Itu Amenitas dalam Kepariwisata*. Diakses dari <http://googleweblight.com/i?u=http://swaragunungkidul.com/apa-itu-amenitas-dalam-kepariwisataan/&grqid=oriRpjDz&hl=en-ID> pada tanggal 5 Juli 2019.

Tradventure Makassar. *Bentuk-bentuk Edukasi, Kemitraan dan Kerjasama dalam Memasarkan Bola Pitue*. Diakses dari <http://googleweblight.com/i?uhttps://tradventuremakassar.wordpress.com/2016/06/08/bentuk-bentuk-edukasi-dan-kemitraan-dan-kerjasama-dalam->

memasarkan-bola-pitue/%grqidid=-vH-gAli&hl=en-ID pada tanggal 20 Juni 2019.

WTC. Pariwisata Indonesia Tumbuh Paling Tinggi. Diakses dari <https://googleweblight.com/i?u=https://industri.kontan.co.id/news/wttc-pariwisata-indonesia-tumbuh-paling-tinggi&grqid=ygpUTQA5&s=1&hl=en-ID> pada tanggal 21 Juni 2019.

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_ACEH%20JAYA_3_2011.pdf . (Diakses pada tanggal 17 Maret 2019).

<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051>. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2019).

http://googleweblight.com/i?u=http://kbbi.web.id/potensi%grqid=qKwsVW32%&s=1%hl=en_ID. (Diakses pada tanggal 20 Maret 2019).

<http://digilib.iainkendari.ac.id/124/3/BAB%20II.pdf>. (Diakses pada tanggal 15 Februari 2019).

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/60705/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. (Diakses pada tanggal 22 Februari 2019).

<https://eprints.uny.ac.id/18655/6/BAB%20II.pdf>. (Diakses pada tanggal 25 Maret 2019).

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/93d524bfc0a07053f57c93cb9c8a5ea7.pdf (Diakses pada tanggal 23 Maret 2019).

<http://digilib.unila.ac.id/11405/14/BAB%20II.pdf>. (Diakses pada tanggal 26 Juni 2019).

http://repository.upi.edu/21523/5/S_MRL_0901658_Chapter2.pdf. (diakses pada tanggal 23 April 2019).

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Power_Point_Perkuliahan/Eksperimen/Populasi_%26_sampel.ppt_%s5BCompatibility_Mode%5D.pdf (Diakses pada tanggal 25 Maret 2019).

<http://acehjayakab.bps.go.id> . (Diakses pada tanggal 25 Juni 2019).

www.acehjayakab.go.id. (Diakses pada tanggal 11 Juni 2019).

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 116/Un.06/FISIP/Kp.07.6/01/2019

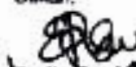
TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang diuangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/PMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.06/PA/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
PERTAMA :
- Menunjuk Saudara
- Dr. Muthlisah, MA, Sebagai pembimbing pertama
 - Mirza Farizki, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama : Ayu Kartina
NIM : 150602075
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Pengembangan Potensi Parawisata di Kabupaten Aceh Jaya
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Januari 2019
An. Rektor
Dekan.


(Emilia Diniy)

Lampiran:

- Revisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Kerus Program Studi Ilmu Administrasi Negara
- Pembimbing yang bersangkutan (Lampiran 1 dan 2)
- Yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopeima Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921
Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1199/Un.08/FISIP/PP.00.9/06/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Juni 2019

Kepada Yth.

di -

Tempat

Assalamu alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Nama : Ayu Karlina
NIM : 150802075
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Pengembangan Potensi
Parawisata di Kabupaten Aceh Jaya.
Lokasi Penelitian: Kantor Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Dekan,


Ernita Dewit



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Jl. Banda Aceh – Meulaboh Telp. (0654) 2210051 Fax. 2210052 Kode Pos 23654

CALANG

Nomor : 124 /2019
Hal : Rekomendasi

Calang, 19 Juli 2019
Kepada Yth,
Yth. Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

Schubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-119/Un.08/FISIP/PP.00.9/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ayu Karlina
NIM : 150802075
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara*
Fakultas : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Ilmu Administrasi Negara
Judul :Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengembangan Potensi Pariwisata

Telah melakukan Penelitian sejak tanggal 28 Juni 2019 s/d 30 Juni 2019 untuk keperluan penulisan Skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengembangan Potensi Pariwisata" bertempat di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.

Demikianlah rekomendasi penelitian ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN ACEH JAYA



ASRI, SE., M. SI
Kabina Utama Muda
Nip. 19661219 1986031 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

Jln. Kuala Meurisi Telepon. 0654- 2210099, Faksimile 0654-2210096

Calang

Calang, 22 Juli 2019 M

19 Dzulkijjah 1440 H

Nomor : 170/CS/DPRK/2019

Lampiran : -

Perihal : **Rekomendasi**

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
di

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1199/Un.08/FISIP/PP.00.9/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Penelitian yang diutamakan kepada kami, dapat kami sampaikan bahwa mahasiswa dengan data berikut ini :

Nama	Ayu Karlina
NIM	150802075
Fakultas	FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/Ilmu Administrasi Negara
Judul	Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Aceh Jaya.
Lokasi Penelitian	Kantor Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Aceh Jaya.

2. Telah melaksanakan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dengan Komisi A DPRK Aceh Jaya pada hari senin, tanggal 22 Juli 2019 yang berlokasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI A DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA

AR - RANIRY

RIZAL DINATA

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Asisten II Bupati Aceh Jaya



Wawancara dengan Anggota DPRK Komisi A Aceh jaya



Wawancara dengan Duta Wisata Aceh Jaya Tahun 2017





Wawancara dengan Masyarakat Aceh Jaya



Wawancara dengan Masyarakat Aceh Jaya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ayu Karlina
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pante Keutapang, 28 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Desa Pante Keutapang, Lamno, Aceh Jaya
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Samsuddin (Alm)
 - b. Ibu : Kamsiah
9. Alamat : Desa Pante Keutapang, Lamno, Aceh Jaya
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Lamno
 - b. SMP : SMP N 1 Jaya
 - c. SMA : SMA N 1 Jaya

Banda Aceh, 26 Juli 2019

Penulis